

## Jika Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Diprediksi Bakal Patah Hati

JAKARTA (IM) - Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan atau Aher dinilai berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) buat Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Namun menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Juacdi mengatakan, lebih baik Anies menunjuk sosok di luar kader tiga partai yang mendukungnya, baik Demokrat, PKS, maupun Nasdem.

"Jika ingin melebarkan pita dukungan tentu Anies harus mengambil sosok lain daripada AHY maupun Aher agar bisa memperbesar skala dan spektrum politik yang besar," kata Ari kepada wartawan, Senin (6/3).

Jika ditilik dari endorse dan saham politik yang terbesar, kata Ari, Demokrat bakal merasa punya modal suara terbesar di antara tiga partai Koalisi Perubahan. Namun demikian, PKS diyakini enggan sekarang jadi penonton dalam koalisi.

Sosok Aher sendiri dinilai mumpuni sebagai pendamping Anies lantaran

rekam jejaknya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dua periode. Jika pada akhirnya Anies memilih AHY jadi pendampingnya, PKS diprediksi bakal patah hati. Jika nanti Aher yang ditunjuk jadi calon RI-2 buat Anies, Demokrat kemungkinan besar tak akan terima.

"Memilih sosok lain di luar calon Demokrat dan PKS bisa menjadi penjamin soliditas Koalisi Perubahan. Jika Anies memilih AHY, maka PKS tentu akan patah hati, demikian juga sebaliknya," ujar Ari.

Menurut Ari, ada sejumlah nama di luar kader Demokrat, PKS, dan Nasdem yang berpotensi diwujudkan sebagai cawapres Anies, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, atau mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Wacana mendeuetkan Anies dengan Sandiaga Uno sebagaimana usulan PKS baru-baru ini dinilai mustahil. Sebabnya, Sandiaga merupakan elite Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Gerindra sendiri telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. ● mei

## Kasus Pencemaran Nama Luhut, Haris Azhar Diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memasuki babak baru.

Polda Metro Jaya lakukan pelimpahan tahap dua atas dua tersangka, Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, Senin (6/3).

"Iya betul hari ini (Senin) pelimpahan tahap II kasus itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Polda Metro Jaya, Senin (6/3).

Haris Azhar Cs telah tiba di Polda Metro Jaya sejak pukul 10.40 WIB. Selanjutnya bertolak ke Kejari Jaktim usai menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Setelah itu pelimpahan ke Kejari (Jakarta) Timur," ujar Haris di kawasan Polda Metro Jaya.

Haris meragukan pihak Polda Metro mendampingi kasusnya tersebut. "Teknisnya enggak tahu gimana, kita berbasis pada hasil. Hasilnya

adalah sama-sama di Kejari Timur," ujarnya.

Haris langsung bergegas meninggalkan Polda Metro Jaya usai menyelesaikan proses administratif guna memperlancar proses pelimpahan tahap 2.

Sebagai informasi, kasus yang menjerat Haris dan Fatia berawal dari laporan Luhut terkait konten video berjudul "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Adal!!". Video ini diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.

Dalam percakapan di video itu, disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.

Laporan Luhut atas dugaan pencemaran nama baik tersebut terdaftar dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021. ● han

## KPK Cegah Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bepergian ke luar negeri. KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk melarang Irwandi pergi ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.

"KPK melakukan upaya cegah untuk tidak melakukan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang pihak terkait," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/3).

Irwandi dicegah agar KPK bisa segera menyelesaikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Aceh. Perkara ini menyeret mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Izil Azhar sebagai tersangka.

Izil Azhar diketahui sebagai orang kepercayaan Irwandi. Irwandi akan dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Dan, dapat dipertanggungjawabkan dengan kebutuhan proses penyidikan," ujar Ali.

KPK berharap Irwandi tetap berada di

Tanah Air dan bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"(KPK) mengingatkan agar kooperatif hadir saat dilakukan pemanggilan oleh tim penyidik," tutur Ali.

Sebagai informasi, Irwandi pernah mendekam di Lapas Sukamiskin karena kasus suap terkait proyek infrastruktur di Aceh. Ia dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Oktober 2022.

Irwandi ditahan KPK sejak 5 Juli 2018. Ia kemudian divonis tujuh tahun penjara pada 8 April 2019. Ia melakukan perlawanan hingga tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Mantan gubernur itu dijebloskan ke Sukamiskin per 14 Februari 2020. Izil, dalam perkara ini, diduga menjadi perantara penerimaan gratifikasi Irwandi sebesar Rp 32,4 miliar.

Gratifikasi itu diberikan oleh pihak Board of Management (BOM) PT Nindya Sejati Joint Operation, yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid.

"Lokasi penyerahan uang diantaranya di rumah kediaman tersangka Izil Azhar dan di jalan depan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh," kata Wakil Ketua KPK, Johannis Tanak, Rabu. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### RAPAT ANGGOTA DAN KONGRES LUAR BIASA KOMITE OLIMPIADE INDONESIA

Ketua MPR yang juga Ketua Umum Pusat IMI Bambang Soesatyo (kedua kanan) disaksikan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari (kanan), Ketum PB PODSI yang juga Chef de Mission Asian Games Hangzhou Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Ketua Umum (Ketum) Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) Gatot S. Dewa Broto (kiri) memukul gong saat membuka Rapat Anggota dan Kongres Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (6/3). Rapat anggota dan kongres luar biasa tahunan Komite Olimpiade Indonesia dihadiri 64 cabang olahraga yang merupakan anggota NOC Indonesia.

## PN Jakpus Tunda Pemilu 2024, Presiden Jokowi: Itu Kontroversi

Jokowi berharap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan. Sebab, anggaran untuk pesta demokrasi tersebut telah dipersiapkan dengan baik.

JAKARTA (IM) - Putusan majelis hakim PN Jakpus yang mengabulkan seluruh gugatan permohonan Partai Prima, menimbulkan kontroversi. Sebab putusan hakim PN Jakpus itu berdampak pada penundaan pemilu 2024 hingga Juli 2025.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengajukan banding.

"Pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi kepada wartawan di Bandung, Senin (6/3).

Jokowi menyebut putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu 2024 adalah putusan

yang kontroversi.

"Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Jokowi yakin tahapan Pemilu tetap berjalan meski ada putusan hakim PN Jakpus yang mengabulkan seluruh gugatan permohonan Partai Prima. Salah satunya penundaan Pemilu 2024 hingga Juli 2025.

"Ya kan sudah saya sampaikan bolak balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik,"

kata Jokowi kepada wartawan di Bandung, Senin (6/3).

Kepala Negara berharap bahwa tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan. Sebab, anggaran pesta akbar demokrasi tersebut telah dipersiapkan dengan baik. "Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata Jokowi.

PN Jakpus yang mengabulkan seluruh gugatan permohonan Partai Prima. Gugatan itu berdampak pada penundaan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Gugatan tersebut diputus pada Kamis, 2 Maret 2023, dengan Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong dan Hakim Anggota H Bakri serta Dominggus Silaban.

PN Jakpus menyatakan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diminta untuk menghentikan sisa tahapan Pe-

milihan Umum 2024 hingga Juli 2025. KPU juga diminta untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada Partai Prima.

Dalam gugatannya, Partai Prima meminta dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai

politik yang ditetapkan lewat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. ● han

## KPK Lelang Barang Sitaan dari Kasus Eks Dirjen Hubla, Ada Emas hingga Jam Tangan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan lelang atas barang rampasan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kali ini, yang dilelang merupakan sitaan dari kasus mantan Direktur Jendral Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan, Antonius Tony Budiono.

"KPK bersama dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III akan melaksanakan lelang barang rampasan tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali, Senin (6/3).

Barang yang disita mulai dari perhiasan berupa gelang rantai emas 18 karat dan beratnya 7 gram. Total dari keseluruhan barang tersebut berkisar Rp4.317.000 dan uang jaminan Rp2.158.500.

Ada juga satu jam buah tangan berjenis Charriol Gran Celtica dengan harga limit

Rp3.332.000 dan uang jaminan Rp1.666.000. Kemudian, ditambahkan Ali, ada satu unit handphone (HP) Samsung yang dilelang dengan nilai limit mencapai Rp5.938.000 dan uang jaminan Rp2.969.000.

"Selain itu, satu paket berisikan dua handphone Samsung dengan harga limit Rp3.762.000 dan uang jaminan Rp1.881.000 juga menjadi salah satu barang yang dilelang. Barang selanjutnya berupa ponsel Samsung dengan harga limit Rp3.742.500 dan uang jaminan Rp3.712.500," katanya.

KPK juga melelang paket berisikan Iphone 11 Pro dengan total limit mencapai Rp5.549.000 dan uang jaminan Rp2.774.500. "Pelaksanaan lelang Rabu, 8 Maret 2023, dengan batas akhir penawaran pukul 10.00 Waktu Server e-Auction (WIB). Tempat lelang di KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat," ujarnya. ● han

## Konsultan Pajak yang Bantu Rafael Alun Kabur ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan peran konsultan pajak yang bekerja dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, orang tersebut telah melarikan diri ke luar negeri. Ia kabur setelah namanya menjadi sorotan.

"Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut," kata Kepala PPATK Ivan Yustianandana kepada wartawan, Senin (6/3).

PPATK sebelumnya telah memblokir nomor rekening dari konsultan pajak Rafael Alun. Konsultan tersebut berperan sebagai profesional money launderer.

Ia juga menilai ada keterlibatan mantan pegawai pajak yang turut bekerja sebagai konsultan pajak untuk Rafael. "Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, PPATK menduga ada pihak profesional yang merupakan konsultan pajak, mengatur ataupun mengelola dugaan pencucian uang mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT).

"Kami mengarah ke dugaan (perantara profesional) tersebut. Tapi analisis berkembang terus,"

kata Kepala PPATK, Ivan Yustianandana saat dikonfirmasi, Jumat (3/3) lalu.

Menindaklanjuti dugaan tersebut, PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening konsultan pajak yang diduga berkaitan dengan pencucian uang Rafael Alun. Bukan hanya konsultan pajak, PPATK juga memblokir rekening pihak lainnya. Sayangnya, Ivan tak menjelaskan secara detail.

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya. Kita mensinyalir ada PML (*professional money launderer*) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," katanya. ● mei

FOTO: ANT



### KY TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN HAKIM

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata (kiri) menerima berkas dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Feri Amsari (kanan) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (6/3). Komisi Yudisial menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim dalam perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 14 April 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

#### Kantor Cabang Pembantu Pandeglang

Jalan Raya Labuan KM. 1 Pandeglang Banten - 42211

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Cabang Cilegon (0254) 386460

Hormat Kami,  
PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin

#### PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT PESONA PUSPITA GEMILANG (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitted or discharge*) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 3 Maret 2023 Nomor 3, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 7 Maret 2023  
Likuidator  
PT PESONA PUSPITA GEMILANG (dalam likuidasi)

#### PEMBERITAHUAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT PUTERA ABADI KARVA (dalam likuidasi) berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") telah berakhir dan para pemegang saham telah menerima pertanggungjawaban Likuidator serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitted or discharge*) kepada Likuidator, sebagaimana diuraikan dalam akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (dalam likuidasi) tanggal 3 Maret 2023 Nomor 5, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 UUPU nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bogor, 7 Maret 2023  
Likuidator  
PT PUTERA ABADI KARVA (dalam likuidasi)